TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

PEMANTAUAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE CALEG DPR RI TERPILIH PADA PEMILU 2024

Transparency International Indonesia

Jakarta, 2024

Latar Belakang

Pada Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembangkan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yang sebagian datanya dapat diakses publik. Data yang tersedia penting dimanfaatkan untuk menemukan korelasi pendanaan kampanye dengan berbagai variabel lain yang dapat menggambarkan lanskap politik Indonesia secara lebih utuh. Selain itu, pemanfaatan data dana kampanye menjadi cara menguji capaian keterbukaan dan akuntabilitas pada area ini, yang merupakan salah satu mandat peraturan perundang-undangan.

Metode

Data anggota caleg DPR RI terpilih diambil dari kanal parlemenkita.org yang dikembangkan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berdasarkan Keputusan KPU setelah diestimasi menggunakan metode Siante Lague.

Data juga telah disesuaikan dengan konteks ambang batas parlemen sesuai ketentuan UU Pemilu, di mana hanya partai politik yang memenuhi perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional yang ikut penentuan perolehan kursi anggota DPR RI.

Data dana kampanye diambil dari kanal Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) yang dikembangkan oleh KPU. Proses pengumpulan data berlangsung s,d, Juni 2024.

Disclaimer

Perbedaan data caleg DPR RI terpilih dan caleg DPR RI yang nantinya dilantik, baik karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilihan umum atau karena penggantian oleh partai politik tidak termasuk dalam jangkauan pemantauan ini.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Inflasi Pengeluaran Dana Kampanye

Parpol	Penerimaan		Pengeluaran		Selisih Pengeluaran (Inflasi)
	2024	2019	2024	2019	
PKB	142.843.530.597,78	142.322.647.279	142.638.531.743,94	141.012.647.279	1.625.884.464,94 (1,15%)
Gerindra	469.525.742.812,40	134.721.849.581	469.047.206.631,61	134.717.249.021	334.329.957.610,61 (248%)
PDIP	600.955.144.217,63	345.025.077.816	600.778.447.677,63	345.006.553.771	255.771.893.906,63 (74,13%)
Golkar	368.318.043.030,77	307.638.877.704	368.301.141.278,77	307.471.571.477	60.829.569.801,77 (19,78%)
Nasdem	245.580.847.743	259.474.071.714	245.424.400.532	232.113.494.650	13.310.905.882 (5,73%)
PKS	220.230.277.983,55	150.042.753.916	220.221.389.095,55	150.025.870.027	70.195.519.068,55 (46,78%)
PAN	223.225.235.021,87	169.048.328.526	218.945.260.021,87	169.048.328.526	49.896.931.495,87 (29,51%)
Demokrat	328.169.284.975,09	189.732.653.608	327.011.306.223,09	189.410.785.377	137.600.520.846,09 (72,64%)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Partai Politik Dengan Pengeluaran Tertinggi ke Terendah (2019 & 2024)

2019				2024		
Urutan	Partai Politik	Total Pengeluaran		Urutan	Partai Politik	Total Pengeluaran
1	PDIP	345.006.553.771	⟷	1	PDIP	600.778.447.677,63
2	Golkar	307.471.571.477	↑	2	Gerindra	469.047.206.631,61
3	Nasdem	232.113.494.650	↓	3	Golkar	368.301.141.278,77
4	Demokrat	189.410.785.377	⟷	4	Demokrat	327.011.306.223,09
5	PAN	169.048.328.526	↓	5	Nasdem	245.424.400.532
6	PKS	150.025.870.027	⟷	6	PKS	220.221.389.095,55
7	PKB	141.012.647.279	↓	7	PAN	218.945.260.021,87
8	Gerindra	134.717.249.021	↓	8	PKB	142.638.531.743,94

Highlight: Dana Kampanye Partai Politik

- Dibandingkan Pemilu 2019, Partai Gerindra mencatatkan peningkatan pengeluaran kampanye tertinggi pada Pemilu 2024, yakni sebesar 248% dan menjadi partai kedua dengan pengeluaran tertinggi di bawah PDIP. Dengan peningkatan 74,3%, PDIP masih tercatat sebagai partai dengan pengeluaran kampanye tertinggi, sama seperti Pemilu 2019.

- Partai lain yang mengalami peningkatan pengeluaran kampanye signifikan pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019 berturut-turut adalah Demokrat (72,64%), PKS (46,78%), PAN (29,51%), dan Golkar (19,78%).

- Partai yang secara persentase mengalami peningkatan pengeluaran kampanye sebesar 1 digit pada Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019 masing-masing adalah Nasdem (5,73%) dan PKB (1,15%).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Kontribusi Pemenang

Parpol	Jumlah Caleg Terpilih	Total Pengeluaran Partai	Total Pengeluaran Caleg Terpilih (persentase)	Rerata
PKB	68/580 **(11,72%)**	142.638.531.743,94	**37.321.279.177 (26,16%)**	**548.842.341**
Gerindra	86/580 **(14,82%)**	469.047.206.631,61	**35.667.691.801 (7,6%)**	**414.740.602**
PDIP	110/580 **(18,96%)**	600.778.447.677,63	**77.768.383.337 (12,94%)**	**706.985.303**
Golkar	102/580 **(17,58%)**	368.301.141.278,77	**130.151.164.328 (35,33%)**	**1.275.991.807**
Nasdem	69/580 **(11,89%)**	245.424.400.532	**55.505.105.133 (22,61%)**	**804.421.814**
PKS	53/580 **(9,13%)**	220.221.389.095,55	**40.444.145.170 (18,36%)**	**763.097.079**
PAN	48/580 **(8,27%)**	218.945.260.021,87	**43.622.365.880 (19,92%)**	**908.799.289**
Demokrat	44/580 **(7,58%)**	327.011.306.223,09	**27.743.426.270 (8,48%)**	**630.532.415**
			Rerata Pengeluaran Caleg Terpilih	**772.799.243**

Highlight: Kontribusi Pemenang

- Selain PDIP dan Gerindra, pada setiap partai politik **persentase pengeluaran kampanye caleg terpilih > persentase jumlah caleg terpilih**. Ini menunjukan bahwa rerata pengeluaran kampanye caleg terpilih juga lebih besar daripada rerata pengeluaran kampanye caleg yang tidak terpilih dari satu partai yang sama.

- Rerata pengeluaran kampanye seluruh caleg terpilih adalah Rp.772.799.243. Rerata pengeluaran caleg terpilih dari Golkar, Nasdem, dan PAN lebih tinggi dari rerata keseluruhan sementara rerata pengeluaran caleg terpilih dari PKB, Gerindra, PDIP, PKS, dan Demokrat lebih rendah dari rerata keseluruhan.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Nomor Urut & Dana Kampanye

No. Urut	Jumlah Caleg Terpilih	Rerata Pengeluaran
1	370	754.757.731
2	113	813.522.293
3	32	830.953.509
4	29	979.664.980
5	17	605.318.390
6	7	492.499.810
7	2	1.250.000.000
8	6	585.630.150
9	1	0
10	3	760.897.500

Highlight: Nomor Urut & Dana Kampanye

- Sebanyak 544 / 93,8% caleg terpilih adalah caleg yang menempati nomor urut 1, 2, 3, dan 4 pada kertas suara.

- Rerata pengeluaran kampanye caleg terpilih dengan nomor urut 1, 2, 3, dan 4 berurutan adalah rerata pengeluaran dari yang rendah ke yang lebih tinggi.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

10 Dapil Dengan Rerata Kemenangan Termahal & Termurah

Termahal	
Dapil	**Rerata Pengeluaran Caleg Terpilih**
Sumbar 2	2.496.335.202
Jabar 10	2.253.192.943
Sumut 2	1.888.988.800
Banten 3	1.765.220.600
DKI Jakarta 3	1.638.138.887
Jabar 6	1.407.044.622
Jateng 5	1.316.720.935
Jabar 3	1.287.102.222
Aceh 2	1.230.116.559
Jabar 8	1.178.372.494

Termurah	
Dapil	**Rerata Pengeluaran Caleg Terpilih**
Jatim 10	94.113.972
Papua	128.546.633
NTB 1	138.126.583
Jatim 5	181.834.252
Gorontalo	230.750.000
Kalbar 2	247.409.225
Kalteng	267.331.745
Sul-Tenggara	280.262.167
Kalsel 2	299.212.100
Jatim 2	323.258.250

Highlight: Dapil & Dana Kampanye

10 dapil dengan rerata pengeluaran kampanye tertinggi untuk caleg DPR RI terpilih masih tersebar di pulau Jawa dan Sumatera. Sebaliknya, 10 dapil dengan rerata pengeluaran kampanye terrendah tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia (kecuali Sumatera).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Interval Dana Kampanye

Interval Penerimaan	Jumlah Caleg Terpilih
0	4
100.000-100.000.000	20
>100.000.000-500.000.000	162
>500.000.000-1.000.000.000	142
>1.000.000.000-3.000.000.000	214
>3.000.000.000-5.000.000.000	24
>5.000.000.000	14

Interval Pengeluaran	Jumlah Caleg Terpilih
0	61
100.000-100.000.000	78
>100.000.000-500.000.000	172
>500.000.000-1.000.000.000	111
>1.000.000.000-3.000.000.000	140
>3.000.000.000-5.000.000.000	14
>5.000.000.000	4

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Interval Penerimaan Dana Kampanye

Interval Penerimaan	Jumlah Caleg Terpilih							
	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	PKS	PAN	Demokrat
0	1	3	0	0	0	0	0	0
100.000-100.000.000	1	7	1	1	5	0	2	3
>100.000.000-500.000.000	26	21	35	17	22	16	14	11
>500.000.000-1.000.000.000	19	19	23	33	17	10	14	7
>1.000.000.000-3.000.000.000	16	28	46	45	19	26	13	21
>3.000.000.000-5.000.000.000	3	3	4	5	6	1	2	0
>5.000.000.000	2	5	1	1	0	0	3	2

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Interval Pengeluaran Dana Kampanye

Interval Pengeluaran	Jumlah Caleg Terpilih							
	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	PKS	PAN	Demokrat
0	15	22	9	0	8	1	1	5
100.000-100.000.000	14	23	12	1	7	9	5	7
>100.000.000-500.000.000	25	23	42	19	20	13	17	13
>500.000.000-1.000.000.000	5	9	19	33	14	13	10	8
>1.000.000.000-3.000.000.000	6	6	27	45	17	17	12	10
>3.000.000.000-5.000.000.000	2	3	0	3	3	0	2	1
>5.000.000.000	1	0	1	1	0	0	1	0

Highlight: Interval Dana Kampanye

- Secara umum, penerimaan kampanye lebih transparan dibandingkan pengeluaran kampanye caleg DPR RI terpilih.

- Gerindra dan PKB menjadi partai politik paling tidak transparan dengan caleg DPR RI terpilih paling banyak yang tidak mencatatkan penerimaan dan pengeluaran kampanye / mencatatkan penerimaan dan pengeluaran kampanye sebesar Rp. 0.

- Golkar menjadi partai politik paling transparan dengan seluruh caleg DPR RI terpilih mencatatkan penerimaan dan pengeluaran kampanye lebih besar dari Rp. 0.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Gender & Dana Kampanye

Gender	Jumlah Caleg Terpilih	Rerata Penerimaan	Rerata Pengeluaran
Laki-laki	453	1.201.128.682	762.161.443
Perempuan	127	1.233.047.905 (+2,65%)	810.743.522 (+6,37%)
	Rerata Keseluruhan	1.208.117.891	772.799.243

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Gender & Dana Kampanye

Parpol	Jumlah Caleg Laki-laki Terpilih	Rerata Pengeluaran Caleg Laki-laki Terpilih	Jumlah Caleg Perempuan Terpilih	Rerata Pengeluaran Caleg Perempuan Terpilih	Rerata Pengeluaran Caleg Terpilih
PKB	54	488.652.456	14 (20,58%)	781.003.324	**548.842.341**
Gerindra	67	371.474.729	19 (22%)	567.309.733	**414.740.602**
PDIP	83	691.795.818	27 (24,54%)	753.678.905	**706.985.303**
Golkar	82	1.278.656.679	20 (19,6%)	1.265.065.832	**1.275.991.807**
Nasdem	48	837.969.616	21 (30,43%)	727.741.123	**804.421.814**
PKS	44	775.260.399	9 (16,98%)	703.631.956	**763.097.079**
PAN	40	841.451.225	8 (16,66%)	1.245.539.613	**908.799.289**
Demokrat	35	677.775.589	9 (20,45%)	446.808.963	**630.532.415**

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Gender & Dana Kampanye

No. Urut	Jumlah Caleg Terpilih	Laki-laki	Perempuan	Rerata Pengeluaran
1	370	298	72	754.757.731
2	113	87	26	813.522.293
3	32	14	18	830.953.509
4	29	25	4	979.664.980
5	17	15	2	605.318.390
6	7	4	3	492.499.810
7	2	2	0	1.250.000.000
8	6	5	1	585.630.150
9	1	0	1	0
10	3	3	0	760.897.500

Highlight: Gender & Dana Kampanye

- Secara umum, rerata penerimaan caleg perempuan lebih tinggi **2,56%** dari rerata penerimaan caleg laki-laki, namun rerata pengeluaran caleg perempuan juga lebih tinggi **6,37%** dari rerata pengeluaran caleg laki-laki.
- Rerata pengeluaran 53,54% caleg perempuan (68 dari 127 orang) lebih tinggi dari rerata pengeluaran 53,86% caleg laki-laki (244 dari 453 orang).
- PKB, Gerindra, PDIP, dan PAN adalah partai politik di mana pengeluaran caleg perempuan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran caleg laki-laki.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

10 Caleg Dengan Penerimaan Tertinggi

Nama	Dapil	Jenis Kelamin	Partai Politik	Penerimaan
Andi Achmad Dara	Banten 3	L	Golkar	9.800.000.000
Sihar PH Sitorus	Sumut 2	L	PDIP	9.579.180.000
Edhie Baskoro Yudhoyono	Jatim 7	L	Demokrat	8.668.800.000
Rina Sa'Adah	Jabar 10	P	PKB	8.000.000.000
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	DKI Jakarta 3	P	Gerindra	7.558.053.672
Okta Kumala Dewi	Banten 3	P	PAN	6.809.525.000
Arisal Aziz	Sumbar 2	L	PAN	6.795.442.580
Dedi Wahidi	Jabar 8	L	PKB	6.000.000.000
Dedi Mulyadi	Jabar 7	L	Gerindra	5.948.500.000
Andi Amar Ma'ruf Sulaiman	Sulsel 2	L	Gerindra	5.740.000.000

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

10 Caleg Dengan Penerimaan Tertinggi

Nama	Dapil	Jenis Kelamin	Partai Politik	Pengeluaran
Andi Achmad Dara	Banten 3	L	Golkar	9.656.581.000
Sihar PH Sitorus	Sumut 2	L	PDIP	8.598.088.000
Rina Sa'Adah	Jabar 10	P	PKB	6.344.309.000
Arisal Aziz	Sumbar 2	L	PAN	6.176.192.580
Martin Manurung	Sumut 2	L	Nasdem	4.982.300.000
Dedi Wahidi	Jabar 8	L	PKB	4.617.722.040
Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo	DKI Jakarta 3	P	Gerindra	4.473.784.672
Sudjatmiko	Jabar 6	L	PKB	4.416.008.830
Mulyadi	Sumbar 2	L	Demokrat	4.133.100.000
Prananda Surya Paloh	Sumut 1	L	Nasdem	3.834.505.080

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

10 Caleg Dengan Penerimaan Terrendah (Tidak Termasuk Penerimaan Rp. 0)

Nama	Dapil	Jenis Kelamin	Partai Politik	Penerimaan
Mori Hanafi	NTB 1	L	Nasdem	6.300.000
Felly Estelita Runtuwene	Sulut	P	Nasdem	6.300.000
Natalis Tabuni	Papua Tengah	L	Nasdem	6.300.000
Abdul Wachid	Jateng 2	L	Gerindra	10.000.000
Dhani Ahmad Prasetyo	Jatim 1	L	Gerindra	13.151.000
Totok Hedi Santosa	DIY	L	PDIP	16.100.000
Paulus Ubruangge	Papua Pegunungan	L	PAN	32.950.000
Ruby Chairani Syiffadia	Lampung 1	P	Gerindra	54.959.000
Nurwayah	DKI Jakarta 3	P	Demokrat	57.020.000
Ratu Ngadu Bonu Wulla	NTT 2	P	Nasdem	63.475.680

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

10 Caleg Dengan Pengeluaran Terrendah (Tidak Termasuk Pengeluaran Rp. 0)

Nama	Dapil	Jenis Kelamin	Partai Politik	Pengeluaran
Mariana	Kalsel 2	P	Gerindra	240.000
Sofwan Dedy Ardyanto	Jateng 6	L	PDIP	721.500
Iyeth Bustami	Riau 1	P	PKB	1.000.000
Shadiq Pasadigoe	Sumbar 1	L	Nasdem	1.300.000
Yuliansyah	Kalbar 1	L	Gerindra	1.600.000
Zulfikar Achmad	Jambi	L	Demokrat	1.750.000
Musthofa	Jateng 2	L	PDIP	2.500.000
Supriyanto	Jatim 7	L	Gerindra	4.000.000
Jamaluddin Idham	Aceh 1	L	PDIP	5.000.000
Abdul Wachid	Jateng 2	L	Gerindra	5.500.000

Audit LPPDK Partai Politik oleh Akuntan Publik

Laporan dana kampanye 7 dari 8 partai politik yang diaudit oleh akuntan publik menghasilkan simpulan patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Hanya audit terhadap laporan dana kampanye 1 partai politik (PKB) yang menghasilkan simpulan ketidakpatuhan sehubungan dengan adanya temuan pengeluaran untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara senilai Rp. 1.420.337.040.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

PENUTUP

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Keterbukaan dana kampanye melalui Sikadeka pada dasarnya sekadar menunjukkan naik dan turun saldo kampanye kandidat tanpa ada kejelasan. Model keterbukaan ini sama sekali tidak mencegah potensi kecurangan dalam pendanaan kampanye, seperti pendanaan dari sumber ilegal, sumbangan yang melewati limit dengan skema nominee (pinjam nama), vote buying terselubung dalam aktivitas kampanye, dan seterusnya. Padahal, indikasi kecurangan pendanaan kampanye telah tampak lebih awal. Misal, PPATK menemukan adanya aliran uang sebesar Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan ke anggota partai politik, atau adanya penerimaan Rp195 miliar dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik.

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Laporan dana kampanye yang diungkap melalui Sikadeka juga patut diduga tidak mencerminkan penerimaan dan pengeluaran sesungguhnya.

Dalam tayangan Bocor Alus Politik yang diproduksi TEMPO, Ario Bimo Nandito (Menpora) yang menjadi caleg Partai Golkar di Dapil Jakarta 1 misalnya, mengaku menghabiskan logistik hingga belasan miliar rupiah (menit 7:38 – 7:56). Namun laporan dana kampanye Ario Bimo Nandito pada Sikadeka hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran masing-masing sebesar Rp. 8.156.175.500 dan Rp. 8.070.578.340.

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Contoh serupa adalah pengakuan yang dibuat Masinton Pasaribu, caleg PDIP di Dapil Jakarta 2 dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Ia mengaku menghabiskan hampir 10 miliar rupiah untuk Pemilu 2024 (menit 14:46 – 14:57). Namun laporan dana kampanye Masinton Pasaribu pada Sikadeka hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran masing-masing sebesar Rp. 916.432.000 dan Rp. 339.000.000.

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Kesimpulan yang sama juga tergambar berdasarkan kesaksian Romahurmuziy, elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – partai yang untuk pertama kalinya gagal lenggang ke DPR sejak berdiri pada 1973. Ia mengungkap bahwa pada Pemilu 2024, ada caleg yang menghabiskan 10 hingga 14 miliar rupiah namun gagal memperoleh kursi di DPR (menit 34:52 – 35:04).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Masih terkait kredibilitas, keterbukaan dana kampanye melalui platform Sikadeka juga patut diragukan akibat adanya ketidakpastian status kelengkapan data (berapa lama proses input data akan berlangsung dan kapan data dinyatakan lengkap). Selain itu, juga didapati sejumlah temuan error yang mengindikasikan ketiadaan sistem atau mekanisme koreksi kesalahan input atau kekeliruan data.

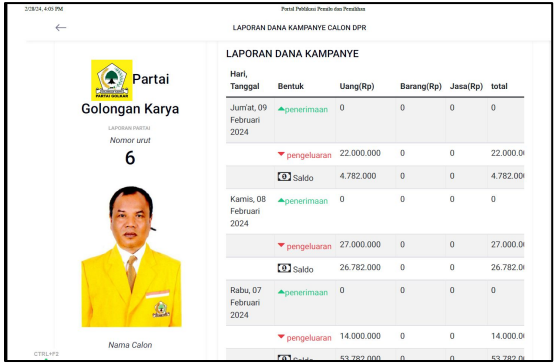

Capture 28 Februari 2024

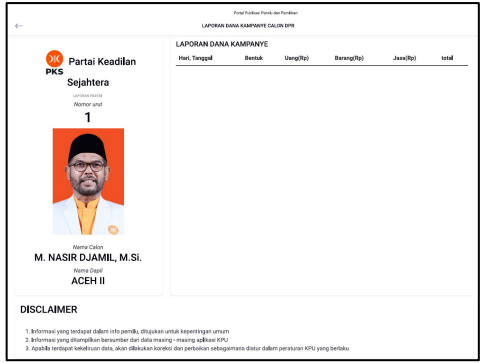

Capture 4 April 2024

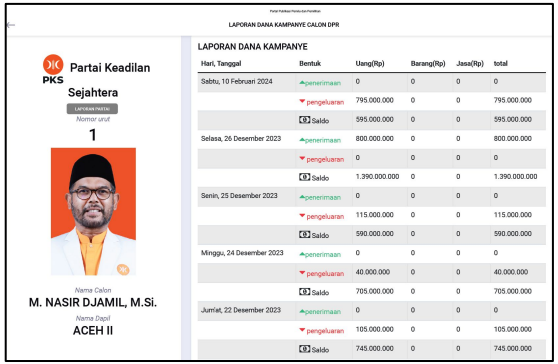

Capture 24 Mei 2024

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Indonesia
the global coalition against corruption

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

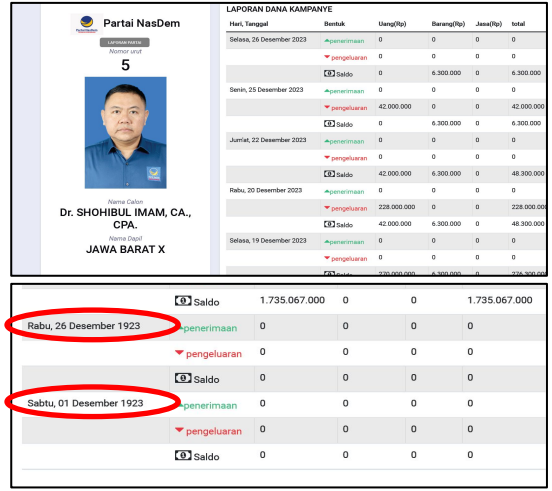

Error Penulisan Nama Dapil	Error Penulisan Tanggal

Catatan Kritis: Tentang Kredibilitas

Akses terhadap informasi dana kampanye melalui Sikadeka bersifat terbatas di mana informasi lengkap hanya dapat diakses oleh KPU dan partai politik peserta pemilu; sukar diolah dan dianalisis di mana data tidak terstruktur dan memerlukan proses penghitungan manual; dan lambat untuk dapat diakses (page load time panjang dan kegagalan memuat halaman terjadi berulang).

Keterbatasan akses Sikadeka bahkan turut dialami Bawaslu yang merupakan otoritas pengawasan resmi penyelenggaraan pemilu.
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/16/bawaslu-keluhkan-keterbatasan-akses-sikadeka

Rekomendasi

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, KPU dan Bawaslu harus menjamin bahwa keterbukaan dana kampanye bukan sekadar memenuhi formalitas, melainkan juga substantif dan akuntabel. KPU harus memungkinkan setiap item penerimaan dan belanja kandidat secara detail dapat diakses publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan. Selain itu, Bawaslu harus proaktif melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap temuan laporan penerimaan dan belanja yang tidak proporsional terhadap fakta kampanye di lapangan.

- Peserta pemilu (partai politik dan kandidat) juga wajib melaporkan dana kampanye secara jujur sebagai batas awal yang tegas yang memisahkan mereka dari permasalahan korupsi politik. Mengabaikan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye harus dipahami sebagai bentuk awal dari perilaku koruptif itu sendiri.

Rekomendasi

- KPU harus meningkatkan kualitas, performa, dan aksesibilitas platform Sikadeka untuk kemudahan pengolahan dan pemanfaatan data oleh publik (user friendly). Pengembangan platform Sikadeka pada dasarnya penting dan strategis untuk memenuhi tujuan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif publik di tengah rumitnya sistem pemilu Indonesia. Sehingga menjadi “teramat mahal” apabila Sikadeka sekadar dimanfaatkan sebagai sarana layanan administrasi peserta pemilu.

TERIMA KASIH

Transparency International Indonesia
The Global Coalition Against Corruption

ti.or.id | @tiindonesia | info@ti.or.id

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption